



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL DI
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli merupakan momentum peringatan akan cita-cita generasi penerus bangsa yang tumbuh semakin berkembang untuk menjadi generasi yang hebat, berkarya untuk menuju Indonesia Emas 2045;
- b. bahwa peringatan Hari Anak Nasional memiliki landasan yang kuat baik secara normatif, edukatif, maupun strategis dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan Hari Anak Nasional perlu dibentuk panitia pelaksana peringatan hari anak nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panitia Pelaksana Peringatan Hari Anak Nasional Di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL DI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Anak Nasional Di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari *Keputusan ini*.

KEDUA : Menetapkan rangkaian penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2025 dengan tema “Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045”.

KETIGA : Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Anak Nasional Di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri atas:

- a. Koordinator Utama;
- b. Koordinator Sekretariat Nasional;
- c. Ketua Unit Strategi dan Perencanaan;
- d. Ketua Unit Bidang *Side Event* untuk Program Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
- e. Ketua Unit Bidang *Side Event* untuk Kegiatan Partisipasi Anak dalam Budaya, Seni dan Permainan Anak;
- f. Ketua Unit Acara Puncak;
- g. Ketua Unit Kemitraan dan *Corporate Social Responsibility*;
- h. Ketua Unit Dokumentasi dan Komunikasi Publik;

i. Ketua ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- i. Ketua Unit Evaluasi dan Pelaporan; dan
- j. Ketua Unit Teknologi Informasi.

KEEMPAT : Masing-masing Panitia Peringatan Hari Anak Nasional Di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, yaitu:

- a. Koordinator Utama bertugas untuk :
 - 1) Mengatur arah kebijakan nasional, menyusun pedoman teknis, memimpin koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta mengawal pelaksanaan program unggulan seperti *Kids Take Over*, insentif akses publik, dan promosi nasional.
 - 2) Mengingatkan setiap K/L untuk mempromosikan Hari Anak Nasional pada semua platform media sosial.
 - 3) Memberikan pemahaman ke masyarakat melalui kampanye positif dengan pemberitaan kinerja keberhasilan K/L terkait dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
- b. Koordinator Sekretariat Nasional bertugas untuk :
 - 1) Menyusun Pedoman Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2025 sebagai bahan acuan dan petunjuk umum bagi semua pihak dalam memperingati Hari Anak Nasional di daerah, pusat, dan luar negeri;
 - 2) Melakukan surat-menyurat dan administrasi yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2025;
 - 3) Mengoordinasikan berbagai kegiatan sebagai rangkaian Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2025 dengan panitia pusat, panitia daerah, perwakilan dalam negeri, perwakilan luar negeri, dan Forum Anak; dan
 - 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2025.
- c. Ketua Unit Strategi dan Perencanaan bertugas untuk menyusun *roadmap* kegiatan (pra, puncak, pasca), kalender kerja, dan rencana logistik.
- d. Ketua Unit Bidang *Side Event* untuk Program Partisipasi Anak dalam Pembangunan bertugas untuk mengelola rekrutmen, pelatihan, dan pelaksanaan program "*Kids Take Over*".

e. Ketua ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- e. Ketua Unit Bidang *Side Event* untuk Kegiatan Partisipasi Anak dalam Budaya, Seni dan Permainan Anak bertugas untuk mengarahkan teknis pelaksanaan kegiatan budaya, ekspresi seni, dan permainan anak.
- f. Ketua Unit Acara Puncak bertugas:
 - 1) mengoordinasikan dan melaksanakan persiapan serta agenda Acara Puncak Peringatan Hari Anak Nasional ke-41 Tahun 2025;
 - 2) memastikan kesiapan dukungan pengisi acara dan dukungan pelaksanaan kegiatan Acara Puncak Peringatan Hari Anak Nasional ke-41 Tahun 2025; dan
 - 3) memastikan pelaksanaan kegiatan Acara Puncak Peringatan Hari Anak Nasional ke-41 Tahun 2025 berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
- g. Ketua Unit Kemitraan dan *Corporate Social Responsibility* bertugas untuk menjalin dan mengelola kerja sama dengan pelaku usaha, penyedia transportasi, dan tempat wisata.
- h. Ketua Unit Dokumentasi dan Komunikasi Publik bertugas untuk meningkatkan eksposur Hari Anak Nasional melalui media sosial, publikasi, dan pelaporan visual.
- i. Ketua Unit Evaluasi dan Pelaporan bertugas untuk merancang instrumen evaluasi, mengumpulkan data, menyusun refleksi kegiatan dan laporan akhir.
- j. Ketua Unit Teknologi Informasi bertugas untuk memastikan tersedianya jaringan internet penyelenggaraan rangkaian Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2025 secara stabil dan memadai.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, Panitia Pelaksana Peringatan Hari Anak Nasional di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 bertanggung jawab untuk menetapkan rencana, jadwal pelaksanaan, pembagian tugas, dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan masing-masing bidang.

KEENAM : Laporan perkembangan kegiatan tiap unit disampaikan oleh masing-masing Ketua Unit pada rapat pleno.

KETUJUH : Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan atau atas arahan Koordinator Utama.

KEDELAPAN ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KEDELAPAN : Panitia Pelaksana Peringatan Hari Anak Nasional di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 melalui Koordinator Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA memberikan laporan persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Hari Anak Nasional Tahun 2025 kepada Sekretaris Kementerian yang bertanggung jawab langsung terhadap Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KESEMBILAN : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Menteri ini bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU 



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI
ANAK NASIONAL DI KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Koordinator Utama	: Pribudiarta Nur Sitepu	Plt. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
II.	Koordinator Sekretariat Nasional	: Eka Prasetiawati	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
	Anggota	: Dinno Ardiana	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Tri Sediarti	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Bayu Harie Nugroho	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Kurniawan	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Mirza Amadea	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Dea Rakhmaniayu S	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
: Movitri Rosmela	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak		



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 7 -

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
		: Aprilia Lilis Wulandari	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Zahra Luthfi Fauziyya	Pengolah Data dan Informasi pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Virdinia Fratika P.	Pengolah Data dan Informasi pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Susanto	Pengolah Data dan Informasi pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Talia Risma Br. Marbun	Pranata Keuangan APBN Terampil pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Nabila Zahra M.	Pranata Keuangan APBN Terampil pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: N Vanesha Aranti Putri	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Elisa Devitasari	Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Nur As'syifa	Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Rosmala Maida	Staf pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
III.	Ketua Unit Strategi dan Perencanaan	: Ciput Eka Purwianti	Asisten Deputy Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
	Anggota	: Eko Novi Arianti	Asisten Deputy Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
		: Suhaeni	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputy Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
		: Widati	Penyuluh Sosial Ahli Madya pada Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
		: Lydia Agnes Gultom	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
		: Novita Atika	Pekerja Sosial Ahli Pertama pada Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
		: Amaranti Sih Utami	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
IV.	Ketua Unit Bidang <i>Side Event</i> untuk Program Partisipasi Anak dalam Pembangunan	: Dwi Jalu Atmanto	Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan
	Anggota	: Devy Nia Pradhika	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah 1
		: Wiyarso Suwarsono	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah 1
		: FB. Didiek Santoso	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan
		: Fitra Andhika Sugiono	Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan
		: Siti Nur Haryanti	Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah 1



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
		: Fattah Amal Iko	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan
		: M. Taufan Arifin	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan
		: Eric Ariyanto	Analisis Anggaran Ahli Pertama pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Mutiara Pitauli	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah 1
		: Devi Ayu Rizki	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah 1
		: Olvy Amalia Harkinasih	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah 1
		: Anggi Ernanda	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah 1
		: Sahroni	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah 1
		: Nur Septiana Sari N	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah 1
V.	Ketua Unit Bidang <i>Side Event</i> untuk Kegiatan Partisipasi Anak dalam Budaya, Seni dan	: Rr. Endah Sri Rejeki	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
	Permainan Anak		
	Anggota	: Prita Ismayani	Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender
		: Muhammad Soleh	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III
		Widyasunu Jalu Kuncoro	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III
		: Ignatius Alvin Krisnugraha	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III
		: Enziana Maharani	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III
		: Choerunnisa	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III
		: Wuri Fitriana	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III
		: Ika Nurhikmah	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III
		: Debbi Ratnaning Utami	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
		: Eko Adit Prasetyo	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 11 -

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
VI.	Ketua Unit Acara Puncak	: Putu Sonia	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
		: Muhammad Ihsan	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
	Anggota	Dita Andriasari	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Wendhy Wijayanto	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Nurhasanah	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Ramos Luther Siahaan	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
		Widia Karolina	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Made Dewinta Cahyaningtyas	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Christine Gitta Candra Puspita	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Lely Febrina Rosa	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Dhian Ningrum Sulistiawati	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 12 -

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
			Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Yosephin Anis Widayanti	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak
VII.	Ketua Unit Kemitraan dan <i>Corporate Social Responsibility</i>	: Susanti	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
	Anggota	: Nanang A. Rachman	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
		: Dianawati Lasmindar	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
		: Siti Wulandari Poerwantini	Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
		: Prima Dea Pangestu	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
		: Rezky Agustian Rentianto	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
		: Nadhila Prameswari Sudigdo	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
		: Yeski Kelsederi	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
		: Ivana Afrilia Stacia Nababan	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
		: Yohana Felisitas Bunga Keray	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
		: Resti Nur Rachmawati	Staf Pendukung pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
VII.	Ketua Unit Dokumentasi	: Nurul Khakimah	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
	dan Komunikasi Publik		
	Anggota	: Murdiany Riniartha	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		: Benedicta Anjaniasti	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		: Ludwie Anggara Samodra	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		: Dimas Prasetyo	Pranata Humas Terampil pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		: Fitri Handayani	Pranata Humas Ahli Pertama pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
VIII.	Ketua Unit Evaluasi dan Pelaporan	: Didik Agus Setiawan	Sekretaris Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak
	Anggota	: Christinita Husni	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Sekretaris Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak
		: Ferdy Ferdiansyah	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Sekretaris Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak
		: Nesya Kartika Rahmawati	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretaris Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak
		: Renna	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Sekretaris Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak
IX.	Ketua Unit Teknologi Informasi	: Muhaziron Sulistiyo Wibowo	Kepala Biro Data dan Informasi



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
	Anggota	: Chrystianto Budi Mulyono	Pranata Komputer Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi
		: Rafi Sukran	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi
		: Muhammad Ardillah	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi
		: Ridwan Baehaqi	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi
		Eko Priyanto	Staf/ <i>Technical Support</i> pada Biro Data dan Informasi

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU